

Inovasi Program Bela Negara Peran Partisipasi Masyarakat dalam Kinerja Implementasi Kebijakan di Kabupaten Jember

La Ode M. Nurdin ^{1*}

¹ Komandan Brigade Infanteri 9/Dharaka Yudha/2 Kostrad

*drloodemnurdin@gmail.com

Abstract. Partisipasi publik dalam mendukung eksistensi negara dari berbagai Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) merupakan fenomena global. Keterlibatan ini dipengaruhi oleh pertimbangan rasional dan semangat nasionalisme. Di Indonesia, keterlibatan warga negara diwujudkan melalui konsep bela negara, yang merupakan hubungan simbiosis mutualisme antara negara dan warganya. Program Bela Negara di Indonesia berbeda dengan Program Wajib Militer di Singapura karena menggabungkan pendekatan militer dan non-militer. Adapun tujuan dalam kajian ini adalah menganalisis kinerja implementasi program bela negara di Kabupaten Jember. Metode kajian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil pembahasan menyatakan bahwa kinerja implementasi program bela negara di Kabupaten Jember dibahas berdasarkan lima aspek, yaitu cakupan, bias, akses, frekuensi, dan kesesuaian program dengan kebutuhan. Masyarakat perlu diberdayakan melalui sosialisasi nilai-nilai bela negara, mengatasi bias dalam kebijakan, meningkatkan partisipasi, mendorong inovasi kebijakan publik, dan memperkuat ketahanan wilayah. Adapun kesimpulan dalam kajian ini menyatakan bahwa partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dalam menjaga kedaulatan negara melalui program bela negara menjadi penting. Diperlukan upaya menyeluruh dalam mendukung kinerja implementasi program tersebut di Kabupaten Jember, termasuk sosialisasi, peningkatan partisipasi, inovasi kebijakan, dan pembinaan ketahanan wilayah. Dengan demikian, kesadaran kolektif dan tindakan bersama dari semua pihak diperlukan untuk memastikan keberhasilan program bela negara dan menjaga eksistensi negara dari berbagai AGHT.

1. Pendahuluan

Keterlibatan publik dalam mendukung eksistensi negaranya dari berbagai macam Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) merupakan fenomena global yang tidak terbatas pada Indonesia saja. Negara-negara lain juga melakukan upaya serupa, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Keterlibatan ini dipengaruhi oleh pertimbangan rasional dan semangat nasionalisme (Serafino, 2016).

Pertimbangan rasional dalam partisipasi warga negara dalam pertahanan negara didasarkan pada keterbatasan jumlah personel militer yang dimiliki oleh setiap negara. Hal ini mendorong pentingnya keterlibatan aktif warga negara dalam upaya pertahanan, seperti yang terjadi di Indonesia dan melalui wajib militer di Singapura. Konsep wajib militer atau national service mengharuskan laki-laki warga negara Singapura atau yang memiliki status Permanent Resident (PR) untuk ikut serta dalam program wajib militer setelah mencapai usia 18 tahun.

Di Indonesia, keterlibatan warga negara dalam menjaga eksistensinya diimplementasikan melalui konsep bela negara. Bela negara dipahami sebagai hubungan simbiosis mutualisme antara negara dan warganya, di mana keduanya saling membutuhkan dan menguntungkan. Sebagai hak asasi, berbela negara dianggap sebagai hak yang harus dimiliki setiap warga negara sejak lahir. Namun, juga dianggap sebagai kewajiban moral dan hukum, yang menuntut partisipasi aktif warga negara sesuai dengan kemampuan dan sarana yang tersedia (Dupuy et al., 2004).

Program Bela Negara di Indonesia tidak hanya dipicu oleh keterbatasan jumlah personel militer, tetapi juga didasarkan pada kontrak sosial antara negara dan warganya. Program ini bertujuan untuk menjaga ketertiban, kesejahteraan, dan kontribusi warga negara terhadap negara menuju masyarakat yang beradab. Secara filosofis, Program Bela Negara merupakan kerjasama egaliter dan deliberatif antara negara dan warganya dalam menjaga eksistensi negara dari berbagai AGHT (Hafel et al., 2021; Nakir, 1945).

Menurut Menteri Pertahanan, bela negara adalah penting sebagai respons terhadap berbagai ancaman, termasuk terorisme, radikalisme, dan ancaman terhadap ideologi Pancasila. Pandangan ini sejalan dengan teori kontrak sosial, yang menjelaskan terbentuknya negara melalui kesepakatan sosial. Dalam konteks kebijakan publik, pandangan ini mendukung prinsip kebijakan publik deliberatif yang mendorong partisipasi aktif warga negara dalam implementasi kebijakan publik untuk mencapai hasil yang optimal.

Penguatan kebijakan publik deliberatif dalam implementasi program bela negara penting untuk memberikan dukungan dan dorongan kepada publik dalam memperkuat eksistensi negara sesuai dengan kapasitas dan proporsi masing-masing warga negara, baik dalam aspek militer maupun non-militer, sesuai Pasal 9 Ayat 2 Undang-Undang (UU) No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Program Bela Negara di Indonesia berbeda dengan Program Wajib Militer yang dilakukan oleh Singapura, karena menggabungkan pendekatan militer dan non-militer untuk merubah sikap dan perilaku warga negara, sesuai amanat UU tentang Pertahanan Negara.

Pertimbangan menjaga nasionalisme melalui kebijakan wajib militer, seperti yang dilakukan oleh Singapura, dilakukan dengan pendekatan militeristik, sementara di Indonesia, keterlibatan warga negara dilakukan melalui pendekatan yang lebih beragam, diarahkan pada merubah sikap dan perilaku warga negara sesuai dengan prinsip-prinsip dalam UU tentang Pertahanan Negara.

Upaya untuk menguatkan sikap dan perilaku warga negara sebagai bagian dari bela negara merupakan aspek ontologis yang penting, yang perlu diwujudkan dengan definisi yang komprehensif untuk mencegah kesalahpahaman dan memastikan implementasi yang tepat (Nakir, 1945). Sikap dan perilaku merupakan hasil dari kebiasaan dan pembiasaan yang terus-menerus, yang berasal dari nilai, norma, moral, dan etika yang terinternalisasi dalam keyakinan individu.

Strategi implementasi program bela negara dapat beragam, termasuk pendekatan top-down dengan fokus pada nilai-nilai bela negara, atau pendekatan bottom-up dengan perhatian pada konteks lokal dan kultural. Penting untuk memperhatikan kedua aspek ontologi dan epistemologi dalam inovasi program bela negara agar program tersebut dapat terimplementasi dengan baik tanpa mengganggu kondisi eksisting.

Salah satu masalah utama dalam pelaksanaan program bela negara adalah kurangnya partisipasi masyarakat yang rendah, seperti yang terlihat dalam data tingkat partisipasi masyarakat dalam program bela negara yang masih rendah (lihat Tabel 1). Masalah ini perlu diperhatikan karena dapat disebabkan oleh ketidaksesuaian antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan yang diterapkan, sehingga mengurangi minat masyarakat untuk ikut serta dalam kebijakan tersebut.

Perbedaan pendekatan antara penelitian sebelumnya dan disertasi ini berpotensi menciptakan kesenjangan penelitian yang dapat menghasilkan temuan baru, karena disertasi ini berfokus pada inovasi kebijakan deliberatif yang tidak bersifat mengganggu. Dengan mengadopsi teori inovasi yang mengutamakan kesederhanaan, kenyamanan, aksesibilitas, dan keterjangkauan, disertasi ini menghindari potensi gangguan dari inovasi kebijakan. Selain itu, mendukung teori lain sebagai middle range theory, seperti teori implementasi kebijakan, dapat memperkuat gagasan-gagasan yang diusulkan dalam disertasi ini.

Kombinasi antara grand theory dan middle range theory memiliki potensi untuk menghasilkan temuan baru yang dapat memperkaya inovasi dalam implementasi program bela negara. Hal ini penting mengingat capaian implementasi program bela negara masih jauh dari target yang telah ditetapkan, terutama dalam mencetak kader bela negara. Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya capaian tersebut adalah dukungan anggaran yang tidak memadai, sehingga menyebabkan program bela negara tidak dapat dijalankan secara optimal.

Tabel 1 Tingkat Partisipasi Publik Dalam Bela Negara di Tiap Kabupaten

No	Kabupaten	Sukarelawan dan instansi	Sukarelawan Perorangan
1.	Banyuwangi	432 relawan	100 relawan
2.	Bondowoso	310 relawan	90 relawan
3.	Jember	440 relawan	101 relawan
4.	Situbondo	260 relawan	75 relawan

Sumber: Data diolah

Di Kabupaten Jember, implementasi program bela negara tidak optimal disebabkan oleh pembinaan bela negara yang cenderung militeristik, seperti latihan baris-berbaris dan training camp, sebagaimana terlihat dari data Komando Resort Militer 083/Baladhika Jaya.

Tabel 2 Tingkat Partisipasi Masyarakat Jember dalam Program

No	Tahun	Kader Bela Negara	
		Ideal	Realisasi
1.	2015	11.673 Kader Bela Negara	476 Kader Bela Negara
2.	2016	11.673 Kader Bela Negara	511 Kader Bela Negara
3.	2017	11.673 Kader Bela Negara	498 Kader Bela Negara
4.	2018	11.673 Kader Bela Negara	558 Kader Bela Negara
5.	2019	11.673 Kader Bela Negara	552 Kader Bela Negara
6.	2020	11.673 Kader Bela Negara	541 Kader Bela Negara

Sumber: Pembinaan Mental Korem 083/Baladhika Jaya Berdasarkan Permenhan

Berdasarkan data dalam Tabel 2, terlihat bahwa realisasi program bela negara di Kabupaten Jember jauh dari idealisasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan). Setiap tahunnya, Kemhan mengharapkan setiap kabupaten/kota mampu melahirkan 11.673 Kader Bela Negara, atau 6 juta Kader Bela Negara dalam satu tahun di 514 kabupaten/kota. Namun, realitasnya, Kabupaten Jember hanya mampu mencetak jumlah yang minim dari target tersebut.

Oleh karena itu, pembinaan yang dilakukan perlu bersifat dinamis dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai publik yang diinginkan, dengan tetap memperhatikan target pembinaan bela negara yang bersifat perubahan sikap dan perilaku warga negara sesuai dengan semangat cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Implementasi pembinaan tersebut harus bersifat deliberatif dan tidak menyebabkan gangguan dalam kebijakan. Langkah-langkah tersebut perlu melibatkan semua pihak secara aktif, dan tidak boleh bersifat mengganggu dalam inovasi program bela negara di masa depan.

2. Metode Penelitian

Kajian ini sejak awal dirancang dalam metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi (Fadli, 2021). Dimana penulis mengonstruksi skema secara runtut mulai dari desain, metodologi kajian, pendekatan, prosedur, hingga metode kajian serta sistem analisis yang di desain secara kolaboratif untuk menghasilkan novelty yang dapat memberikan pengayaan terhadap Ilmu Administrasi, khususnya dalam optimalisasi kinerja implementasi program bela negara.

3. Hasil dan Pembahasan

Kinerja Implementasi program bela negara di Kabupaten Jember Untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan, menurut (Winterford, 2016), ada beberapa aspek yang dapat diukur. *Pertama*, adalah cakupan, yang mengukur seberapa besar kelompok sasaran yang sudah terjangkau oleh kebijakan publik. *Kedua*, adalah bias, yang mengukur apakah pelayanan yang diberikan cenderung bias kepada kelompok sasaran tertentu atau tidak. *Ketiga*, adalah akses, yang menilai apakah kelompok sasaran memiliki akses yang sama terhadap program atau tidak. *Keempat*, adalah frekuensi, yang mengukur seberapa sering kelompok sasaran mendapatkan layanan yang dijanjikan oleh program. *Kelima*, adalah kesesuaian program dengan kebutuhan, yang menilai apakah pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan tepat waktu.

1) Cakupan Program bela negara di Kabupaten Jember

Tradisi pertahanan negara telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kebudayaan Indonesia sejak zaman dahulu. Perlawanan heroik terhadap penjajah yang tercermin dalam berbagai perang kemerdekaan, seperti Perang Diponegoro, Perang Paderi, dan tentunya Perang Dunia II, menunjukkan betapa kuatnya semangat bela negara yang melekat pada jiwa bangsa. Arti dari bela negara tidak hanya terbatas pada ranah militer, melainkan juga merambah ke segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Ini tercermin dalam semangat gotong royong dan kebersamaan yang terwujud dalam berbagai tradisi dan adat istiadat di masyarakat Indonesia.

Pada konteks yang lebih modern, pentingnya bela negara semakin ditekankan dengan diberlakukannya Undang-Undang Pertahanan yang baru. Undang-Undang ini menegaskan kewajiban partisipasi seluruh warga negara dalam upaya pembelaan negara. Hal ini mencakup tidak hanya keterlibatan dalam bidang militer, tetapi juga mendukung aspek-aspek lain yang mendukung keberlangsungan dan kemajuan negara, seperti pembangunan ekonomi, penegakan hukum, dan perlindungan lingkungan.

Mensosialisasikan nilai-nilai bela negara kepada seluruh masyarakat menjadi suatu hal yang sangat penting. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang arti dan pentingnya bela negara, diharapkan masyarakat dapat secara sukarela berkontribusi dalam upaya mempertahankan kedaulatan dan kemajuan negara. Ini bisa dilakukan melalui partisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial, mendukung produk dalam negeri, berperan aktif dalam memajukan pendidikan dan kesehatan masyarakat, serta menjaga kelestarian budaya dan lingkungan hidup.

Upaya mensosialisasikan nilai-nilai bela negara tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah atau lembaga negara semata, tetapi juga merupakan kewajiban setiap individu dalam masyarakat. Hanya dengan kesadaran kolektif dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, cita-cita pembangunan dan kemajuan negara dapat tercapai secara berkelanjutan.

2) Bias Program bela negara di Kabupaten Jember

Pengamatan peneliti menyoroti pentingnya memiliki sistem pertahanan yang melibatkan seluruh potensi bangsa untuk menjaga kedaulatan negara. Konsep ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara, tidak hanya dari ancaman luar, tetapi juga dari ancaman dalam negeri. Namun, dalam prakteknya, terkadang terdapat bias dalam kebijakan pembinaan teritorial.

Bias dalam kebijakan tersebut dapat muncul dari berbagai faktor, baik dari luar maupun dari dalam. Faktor internal mungkin meliputi preferensi atau kepentingan kelompok tertentu, sementara faktor eksternal bisa berasal dari tekanan atau pengaruh dari pihak-pihak eksternal. Misalnya, terdapatnya kecenderungan untuk mengalokasikan lebih banyak sumber daya atau perhatian kepada daerah atau kelompok tertentu, sementara daerah lain diabaikan.

Untuk mengatasi bias dalam kebijakan pembinaan teritorial, dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan. Ini mencakup kolaborasi antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Kolaborasi semacam ini dapat membantu memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan juga penting untuk mencegah terjadinya bias dan memastikan kebijakan yang diambil adalah yang terbaik untuk kepentingan bersama. Dengan demikian, upaya bersama dari berbagai pihak menjadi kunci dalam mengatasi bias dalam kebijakan pembinaan teritorial dan memastikan keadilan serta keberlanjutan dalam pembangunan nasional.

3) Akses Program bela negara di Kabupaten Jember

Setiap warga negara memiliki kewajiban aktif dalam pembelaan negara, sebuah prinsip yang diatur dalam Undang-Undang yang telah dijelaskan sebelumnya. Tanggung jawab ini tidak hanya menjadi beban TNI atau lembaga pertahanan lainnya, melainkan merupakan tanggung jawab setiap individu. Di Indonesia, dengan wilayah yang terdiri dari ribuan pulau dan keragaman geografis yang kompleks, pengawasan yang ketat dari pemerintah dan partisipasi aktif semua warga menjadi sangat penting untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai ancaman yang mungkin timbul.

Kesadaran akan pentingnya bela negara merupakan modal dasar bagi setiap warga negara untuk menjaga kedaulatan dan keberlangsungan negara, serta memperkuat persatuan di tengah keberagaman. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan semangat UUD 1945 yang menegaskan hak dan kewajiban setiap warga untuk ikut serta dalam upaya pertahanan negara. Pembinaan kesadaran bela negara menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa setiap individu memahami dan siap untuk menjalankan tanggung jawabnya dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara.

Aktualisasi bela negara tidak hanya terbatas pada konteks perang, tetapi juga melalui berbagai cara yang beragam. Ini dapat dilakukan dengan melestarikan kearifan lokal, mendukung produk dalam negeri, atau memberikan bantuan kepada korban bencana. Pada tingkat mikro, aktualisasi ini tercermin dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban harian yang dilakukan oleh setiap individu. Sedangkan pada

tingkat makro, aktualisasi bela negara dilakukan melalui kerjasama semua elemen masyarakat untuk mencapai tujuan bersama menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dengan demikian, kesadaran dan tindakan bela negara bukanlah hanya tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan bagian dari komitmen bersama dalam membangun dan melindungi bangsa.

4) Frekuensi Program bela negara di Kabupaten Jember

Inovasi memegang peran kunci dalam menghadapi tantangan dan menyelesaikan masalah di berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam kebijakan publik. Di tengah kompleksitas dinamika masyarakat yang terus berkembang, negara sebagai regulator kebijakan publik memiliki tanggung jawab penting dalam menyusun kebijakan yang responsif dan relevan. Inovasi kebijakan publik yang strategis menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut memiliki nilai tambah dan keberdayaan yang relevan bagi masyarakat.

Pentingnya inovasi dalam kebijakan publik juga berkaitan erat dengan kualitas kebijakan yang dihasilkan. Kualitas kebijakan yang baik tidak hanya menjamin efektivitas tata pemerintahan, tetapi juga memastikan responsivitas terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Namun, meskipun inovasi dianggap sebagai kunci keberhasilan dalam merumuskan kebijakan yang adaptif, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi dalam mengimplementasikannya.

Salah satu tantangan utama dalam mengimplementasikan inovasi kebijakan adalah terkait dengan kemampuan dan kemauan untuk berinovasi di kalangan pejabat publik. Kultur organisasi yang kaku, kurangnya keterampilan atau pengetahuan tentang inovasi, serta resistensi terhadap perubahan bisa menjadi hambatan yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mendorong dan memfasilitasi lingkungan yang mendukung inovasi di tingkat lokal.

Di tingkat lokal, seperti dalam konteks program bela negara di Kabupaten Jember, upaya untuk mendorong inovasi kebijakan publik menjadi sangat penting. Dengan menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif dan berdaya guna, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih efektif. Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi dan sumber daya lainnya, inovasi kebijakan dapat menjadi sarana yang efektif dalam meningkatkan kualitas hidup dan pelayanan publik bagi masyarakat lokal.

5) Kesesuaian Program dengan Kebutuhan

Penciptaan ketahanan wilayah merupakan langkah krusial dalam memastikan ketahanan nasional yang kokoh. Namun, hal ini tidak dapat dicapai tanpa dukungan penuh dari semua elemen masyarakat. Ketahanan wilayah melibatkan kesadaran kolektif setiap warga akan identitas dan kedaulatan negara, yang menjadi landasan kuat bagi keberlangsungan negara. Untuk mencapai ketahanan yang mantap, diperlukan upaya pembinaan dalam berbagai bidang, termasuk geografi, demografi, kondisi sosial, pertahanan, dan keamanan.

Pada konteks pembinaan ketahanan wilayah, kegiatan One Day dan One Week menjadi instrumen penting yang mempertimbangkan beberapa aspek krusial. Melalui kegiatan ini, upaya pembinaan dapat dilakukan secara terencana dan terkoordinasi. Misalnya, dalam bidang geografi, kegiatan tersebut dapat melibatkan pemetaan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemantauan potensi bencana. Sedangkan dalam bidang demografi, kegiatan tersebut dapat berfokus pada pendataan populasi, pengembangan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, kegiatan One Day dan One Week juga memberikan kesempatan untuk memperkuat kondisi sosial dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pertahanan dan keamanan. Melalui berbagai kegiatan sosial, pendidikan, dan pelatihan, masyarakat dapat lebih memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam menjaga ketahanan wilayah. Ini termasuk kesadaran akan ancaman baik dari dalam maupun dari luar, serta upaya untuk meningkatkan kewaspadaan dan partisipasi dalam menjaga keamanan.

Secara keseluruhan, kegiatan One Day dan One Week menjadi sarana efektif dalam mendukung pembinaan ketahanan wilayah yang komprehensif. Dengan melibatkan semua elemen masyarakat dan mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan, diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang aman, stabil, dan sejahtera bagi seluruh warga negara.

Berdasarkan lima aspek kinerja implementasi program bela negara di Kabupaten Jember menggarisbawahi pentingnya partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam menjaga kedaulatan negara. Upaya sosialisasi nilai-nilai bela negara menjadi kunci untuk mendorong kontribusi sukarela

masyarakat. Selain itu, ditekankan pula pentingnya mengatasi bias dalam kebijakan pembinaan teritorial dengan dukungan dari berbagai pihak. Setiap warga negara diwajibkan untuk aktif dalam pembelaan negara, dan kesadaran akan bela negara diimplementasikan melalui berbagai cara, termasuk mendukung produk dalam negeri dan membantu korban bencana.

Inovasi dalam kebijakan publik menjadi krusial dalam menyusun kebijakan yang responsif terhadap dinamika masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam mengimplementasikan inovasi kebijakan, khususnya terkait dengan kemampuan dan kemauan untuk berinovasi di kalangan pejabat publik. Oleh karena itu, upaya untuk mendorong inovasi kebijakan publik di tingkat lokal menjadi penting.

Ketahanan wilayah ditekankan sebagai prasyarat bagi ketahanan nasional, yang harus didukung oleh semua elemen masyarakat. Pembinaan geografi, demografi, kondisi sosial, serta kondisi pertahanan dan keamanan menjadi langkah penting dalam mencapai tujuan tersebut. Melalui kegiatan One Day dan One Week, diharapkan terbentuk ikatan kebersamaan dan peningkatan kesadaran terhadap kerawanan keamanan, yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap implementasi program bela negara di Kabupaten Jember.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pentingnya partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam menjaga kedaulatan negara menjadi sorotan utama. Upaya sosialisasi nilai-nilai bela negara menjadi kunci untuk mendorong kontribusi sukarela masyarakat. Selain itu, penekanan pada perlunya mengatasi bias dalam kebijakan pembinaan teritorial dengan dukungan dari berbagai pihak menunjukkan upaya untuk menciptakan lingkungan yang adil dan merata bagi seluruh warga negara.

Kewajiban setiap warga negara untuk aktif dalam pembelaan negara, sejalan dengan Undang-Undang yang telah dijelaskan, menegaskan pentingnya kesadaran akan bela negara sebagai modal dasar untuk menjaga kedaulatan dan keberlangsungan negara. Mensosialisasikan nilai-nilai bela negara kepada seluruh masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam memastikan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.

Di sisi lain, inovasi dalam kebijakan publik menjadi krusial dalam menyusun kebijakan yang responsif terhadap dinamika masyarakat. Namun, tantangan dalam mengimplementasikan inovasi kebijakan, terutama terkait dengan kemampuan dan kemauan untuk berinovasi di kalangan pejabat publik, menyoroti perlunya upaya untuk mendorong inovasi kebijakan publik di tingkat lokal.

Penciptaan ketahanan wilayah sebagai prasyarat bagi ketahanan nasional membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat. Melalui kegiatan One Day dan One Week, diharapkan terbentuk ikatan kebersamaan dan peningkatan kesadaran terhadap kerawanan keamanan, yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap implementasi program bela negara di Kabupaten Jember.

References*

- [1] Dupuy, T. N., Hayes, G., Chase, B., & Tulenko, T. (2004). The Role of State Defense Forces in Homeland Security 15. December.
- [2] Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- [3] Hafel, M., Jamil, J., Umasugi, M., & Anfas. (2021). Collaborative Governance between Stakeholders in Local Resource Management in North Maluku. *Journal of Hunan University ...*, 48(April), 82–87. <http://jonuns.com/index.php/journal/article/view/541>
- [4] Nakir, M. (1945). Politik hukum bela negara dalam perspektif pertahanan negara -. 35–52.
- [5] Peters, B. G., & Pierre, J. (2006). Handbook of public policy. *Handbook of Public Policy*, 1–512. <https://doi.org/10.4135/9781848608054>
- [6] Serafino, N. M. (2016). Security Assistance and Cooperation: Shared Responsibility of the Departments of State and Defense.
- [7] Winterford, K. (2016). A positive notion of power for citizen voice and state accountability. *Development in Practice*, 26(6), 696–705. <https://doi.org/10.1080/09614524.2016.1195793>